# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Investasi dari sektor swasta telah sejak lama merupakan salah satu prioritas sumber pembiayaan, baik bagi pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah. Terdapatnya kebijakan tersebut karena dana yang bersumber dari pemerintah semakin terbatas dan sementara kebutuhan untuk kegiatan pembangunan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat yang mengarah kepada persaingan untuk menarik investasi sector swasta, tidak terkecuali sekalipun Negara yang telah maju. Dari sisi lain Negara berkembang yang nota bene sebagai Negara yang paling membutuhkan investasi, dengan kemajuan teknologi, informasi dan transportasi dihadapkan pula kepada persaingan diantara Negara berkembang untuk menarik investasi selain Negara yang telah maju.

Perkembangan dunia seperti di atas bagi Daerah merupakan suatu tantangan selain peluang. Tantangan dalam pengertian lain sejauh mana Daerah dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan peluang sejauh mana pula Daerah dapat memanfaatkan berbagai keunggulannnya agar

menjadi menarik bagi dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Daerah yang bersangkutan.

Pelayanan yang optimal dengan kondisi seperti itu menjadi suatu kebutuhan yang semakin penting untuk ditingkatkan dan sudah barang tentu membutuhkan konsolidasi dalam pengertian kerjasama yang semakin meningkat dengan berbagai pihak khususnya termasuk dengan stakeholder lainnya yaitu Pemda Kabupaten/Kota.

Pengolahan data dan informasi merupakan suatu hal mutlak diperlukan bagi sebuah organisasi, terlebih di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, dimana penyajian informasi dituntut tidak hanya harus akurat tapi juga bisa diperoleh dengan mudah dan cepat.

Untuk menyajikan informasi yang cepat dan akurat ini, maka dalam proses pengolahan data harus dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem yang biasa disebut sistem informasi. Dengan dilakukannya proses pengolahan data secara terkomputerisasi, maka pekerjaan-pekerjaan pengolahan data tersebut bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat khususnya divisi pelayanan dan fasilitasi investasi, sistem informasi yang ada masih bersifat manual. belum semuanya terkomputerisasi. Kebanyakan masih menggunakan mesin tik.

Tugas pokok dari Subbidang pelayanan dan fasilitasi investasi yaitu melayani dan memfasilitasi dan mensosialisasikan perihal investasi kepada investor. Proses pengolah data yang dilakukan telah menggunakan komputer, namun penginputan yang dilakukan masih bersifat manual dengan bantuan aplikasi Microsoft Office word & Excel. Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu sistem informasi yang telah terkomputerisasi Di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat khususnya divisi pelayanan dan fasilitasi investasi dan menjadikannya sebagai objek penelitian pada kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan oleh penulis. Adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

**"SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN FASILITASI INVESTASI DI BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPPMD) PROVINSI JAWA BARAT".**

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Belum efektifnya sistem informasi dalam pengolahan data dan informasi penanaman modal pada Subbidang pelayanan dan fasilitasi investasi.
2. Sistem informasi pelayanan dan fasilitasi investasi dan informasi penanaman modal di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) masih dilakukan secara manual sehingga menghambat dalam proses pengolahan data.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem informasi pengolahan data dan sistem informasi pelayanan dan fasilitasi investasi yang sedang berjalan pada Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana perancangan sistem informasi pelayanan dan fasilitasi investasi yang diusulkan pada Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan

Adapun tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah :

1. Untuk mengetahui sistem informasi pengolah data dan informasi penanaman modal yang sedang berjalan pada Subbidang pelayanan dan fasilitasi investasi dan penanaman modal pada Badan Koordonaso Promosi dan penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat
2. Untuk membuat usulan sistem informasi pengolahan data dan informasi penanaman modal yang terkomputerisasi pada Subbidang pelayanan dan fasilitasi investasi yang di usulkan pada Badan Koordonasi Promosi dan penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat

## 1.4. Batasan Masalah

Penelitian di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah hanya pada bidang Subbidang pelayanan dan fasilitasi investasi. Dari rumusan masalah di atas, penulis membatasi permasalahan pada :

1. Proses pelayanan dan fasilitasi investasi

2. Penelitian hanya membuat perencanaan pengembangan bukan pembuatan pembuatan program

## 1.5. Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek lapangan

Kerja praktek lapangan ini dilakukan di Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Sumatera No. 50, Bandung.

Table 1.1

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

| NO | AKTIVITAS | WAKTU | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Kerja Praktek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penerimaan Kerja Praktek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kerja Praktek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## 2.1. Pengertian Sistem

Suatu system dapat di definisikan sebagai suatu kesatuan yang teridi dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sistem, diantaranya :

Menurut Zulkifli amsyah (2001 : 105) *Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi*.

Menurut jogiyanto (1999 : 684) *Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.*

Dari pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari "Sistem adalah suatu kumpulan komponen fisik maupun non-fisik yang membentuk suatu jaringan kerja untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai sasaran tertentu".

### 2.1.1. Elemen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, diantaranya adalah :

1. Tujuan

   Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tentu saja, tujuan antara sistem satu dengan sistem yang lain berbeda.

2. Masukan

   Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan

mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

3. Proses

   Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang tidak berguna.

4. Keluaran

   Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi keluaran bisa berupa suatu informasi, sasaran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5. Batas

   Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem.

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

   Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk

mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

7. Lingkungan

   Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

### 2.1.2. Karakteristik Sistem

Adapun penjelasan dari karakteristik suatu sistem adalah sebagai berikut :

1. Komponen Sistem

   Bagian sistem yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan. Komponen atau elemen sistem dapat berupa subsistem atau beberapa bagian sistem.

2. Batasan Sistem

Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan lingkungannya atau dengan sistem yang lainnya. Batas sistem inilah yang membuat system dipandang sebagai satu kesatuan.

3. Lingkungan Luar Sistem

   Segala sesuatu yang berada di luar system yang mempengaruhi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan sistem atau merugikan sistem.

4. Penghubung Sistem

   Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dengan penghubung inilah yang menyebabkan beberapa subsistem berintegrasi dan membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem

   Sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang berasal dari lingkungan.

6. Keluaran Sistem

   Suatu hasil dari proses pengolahan system yang dikeluarkan ke lingkungan.

7. Pengolah Sistem

   Bagian dari sistem yang mengubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran dan Tujuan Sistem

   Sasaran sistem adalah sesuatu yang menyebabkan mengapa sistem itu dibuat atau ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

2.1.3. Klasifikasi Sistem

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

   *Sistem abstrak* adalah sistem yang berupa pemikiran, gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan.

   *Sistem fisik* adalah sistem yang ada secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer , sistem sekolah, sistem penjualan, sistem akuntansi dan sistem transportasi.

2. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik

   *Sistem deterministik* adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksikan secar tepat, misalnya sistem komputer.

   *Sistem probabilistik* adalah system yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem sediaan, kebutuhan rata-rata dan waktu untuk memulihkan

jumlah sediaan dapat ditentukan tetapi nilai yang tepat sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti.

3. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

   *Sistem tetutup* adalah sistem yang tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi.

   *Sistem terbuka* adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem perusahaan dagang.

4. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

   *Sistem alamiah* adalah system yang tejadi karena alam, misalnya sistem tata surya.

   *Sistem buatan manusia* adalah sistem yang dibuat oleh manusia, misalnya sistem komputer.

5. Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks

   Berdasarkan tingkat kerumitannya, system dibedakan menjadi sistem sederhana (misalnya sepeda) dan sistem kompleks (misalnya otak manusia).

## 2.2. Pengertian Informasi

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang sangat berguna untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisai, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Keadaan dari system dalam hubungannya dengan keberakhirannya disebut dengan istilah *entrophy*.

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal atau data idem. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak sebelum diolah, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data dapat berbentuk symbol-simbil semacam huruf-huruf atau alpaet, angka-angka, bentuk-bentuk suara, sinyal-sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. **Akurat** berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi arus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi haus akurat karena dari sumber ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi

ganguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. **Tepat pada waktunya**, berarti informasi yang dating pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah using tidak aka nada nilainya lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat,maka berakibat fatal untuk organisasi. Mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat. **Relevan,** berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap orang satu dengan yang lainya berbeda.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian informasi, diantaranya :

Menurut jogiyanto (1999 : 686) Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian(*events*) yang nyata(*fact*) yang berguna untuk para pengambil keputusan.

Menurut Zulkifli amsyah (2001 : 105)Informasi adalah data yang telah diolah dengan cara tertentu sesuai dengan bentuk yang diperlukan.

Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari “Informasi adalah data-data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerima informasi tersebut.”

## 2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari oang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedure-prosedure dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memproses tipe transaksi tertentu, memberi sinyal kepada management dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan external yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik.

Menurut jogiyanto (1999 : 684) Pengertian Sistem Informasi menurut Robert A. Leith dan K. Roscoe Davis adalah "Sistem Informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan" .

## 2.4. Metode Analisis dan Perancangan Terstruktur

### 2.4.1. Flow Map

Flow map merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir yang termasuk tembusan-tembusannya, juga merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi serta dapat mengevaluasi suatu permasalahan yang diharapkan dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

### 2.4.2. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah arus data yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar. Bagian luar ini merupakan sumber arus data atau tujuan yang berhubungan dengan sistem informasi tersebut.

### 2.4.3. Data Flow Diagram

*Data Flow Diagram* (DFD) atau Diagram Aliran Data adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi khusus untuk menggambarkan arus data atau aliran data yang terjadi di dalam sistem. *Data Flow Diagram* (DFD) memproses sistem dalam komponen-

komponen beserta seluruh penghubung antar komponen. *Data Flow Diagram* (DFD) ini merupakan penurunan atau penjabaran dari diagram konteks.

### 2.4.4. Kamus Data

Kamus data adalah katalog fakta tentang datangnya data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan mengunakan kamus data, pemakai dan analis sistem bisa mempunyai pengertian yang sama tentang input dan output. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada pada *data flow diagram* (DFD).

# BAB III
# PROFIL PERUSAHAAN

## 3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

BKPPMD (Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah) merupakan suatu badan yang mengumpulkan investor dan institusi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki Jawa Barat serta dalam rangka *Image Building* bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kondusif untuk berinvestasi. menggali potensi investasi yang ada di Jawa Barat yang berkaitan dengan perkembangan, realisasi dan profil PMA/PMDN, sehingga visualisasi perusahaan PMA/PMDN akan dapat di promosikan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

Undang–undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950 ).

Undang–undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang – undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal asing (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 46, tambahan lembaran Negara Nomor 2943).

Undang–undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang – undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 2944 ).

Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman modal ;

Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2003, tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi ;

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pamantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi ;

Keputusan Menteri Negara penggerak Dana Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal asing ;

Keputusan Menteri Negara penggerak Dana Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 25/SK/2001, tanggal 8 Oktober 2001, tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Tast Force) Penanaman Modal Tingkat Nasional ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;

Sehubungan dengan hal tersebut ketersediaan sarana informasi diantaranya berupa ***perkembangan, realisasi dan profil investasi PMA/PMDN serta Instrumen Identifikasi Data Realisasi PMA/PMDN*** adalah akan menunjang terhadap pemberian pelayanan yang lebih meningkat untuk memenuhi kebutuhan informasi khususnya dunia usaha. Sarana informasi ini dalam aplikasinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah, dan khususnya bagi investor dalam menentukan pilihannya berinvestasi di Jawa Barat.

Kegiatan Pengendalian Data Realisasi PMA/PMDN, dilaksanakan bekerjasama dengan Instansi Penanaman Modal atau instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi Data Realisasi PMA/PMDN yang berada di wilayah Kab/Kota, baik yang berada di Kawasan Industri maupun yang berada di zona industri.

**3.2 Struktur Organisasi**

Badan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah memiliki tiga bidang/divisi, yaitu bidang divisi/bagian umum, bidang divisi/bagian pengendalian, dan bidang divisi/bagian pelayanan dan fasilitasi investasi, sesuai dengan divisi/bagian saya (penulis) melakukan kerja praktek. Dibawah ini

adalah struktur organisasi pada divisi/bagian pelayanan dan fasilitasi investasi dan penanaman modal. Divisi ini juga dibagi dua lagi yaitu pelayanan investasi, dan fasilitasi investasi.

Karyawan yang bekerja departement bidang pelayanan dan investasi sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 pelaksana, 2 kepala masing-masing untuk pelayanan dan investasi dan 1 kepala bidang pelayanan dan investasi

Tabel 3.1

**Kabid Pelayanan & Fasilitasi Investasi**

| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Drs. Benny Setiadi, MM | **Kabid Pelayanan & Fasilitasi Investasi** |
| 2 | Drs. Rahmayadi Basyar, MM | **Sub.Bid Pelayanan** |
| 3 | Wahyu Edi Jajang, SE | Pelaksana |
| 4 | Wachyudi Prihatna | Pelaksana |
| 5 | Ido Kuswanda | Pelaksana |
| 6 | Engkur Kurniasih | Pelaksana |
| 7 | Tatang Mulyana | Pelaksana |
| 8 | H. Taufiq, SH. M.Si | **Sub.Bid Fasilitasi** |
| 9 | Neni Rosdiani, SH. M.Si | Pelaksana |
| 10 | Endang Maesala, B.Sc | Pelaksana |
| 11 | Di an Purnama, S.Sos | Pelaksana |
| 12 | Maman Suherman | Pelaksana |
| 13 | Yuliyanti | Pelaksana |

### 3.3 Deskripsi kerja

Deskripsi kerja dari divisi/bagian pelayanan&fasilitasi investasi dan penanaman modal adalah sebagai berikut

1) Mensosialisasikan tentang apa, dan bagaimana cara dan bentuk penanaman modal di setiap kabupaten provinsi jawa barat
2) Melayani dan memfasilitasi investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di indonesia, khususnya di provinsi jawa barat
3) Penyusunan Panduan Profil Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat.
4) Pengolahan Data Profil Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat
5) Pelaksana Sosialisasi Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi.di Jawa Barat.
6) Penyusunan Profil Potensi dan peluang Investasi di Jawa Barat.
7) Sosialisasi Profil Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat.
8) Penyusunan Instrumen Profil Investasi Infrastuktur di Jawa Barat
9) Pengumpulan Data Profil Investasi Infrastuktur di Jawa Barat.
10) Penyusunan Profil Investasi Infrastuktur di Jawa Barat.
11) Pembahasan Profil Investasi Infrastuktur di Jawa Barat.
12) Sosialisasi Profil Investasi Infrastuktur di Jawa Barat.

13) Mempersiapkan rencana kerja sesuai dengan lingkup masing – masing Sub Kegiatan yang terdapat pada kegiatan Pendukungan Penanaman Modal di Jawa Barat.
14) Melaksanakan Kegiatan yang terdapat pada Sub-Sub kegiatan Pendukungan Penanaman Modal di Jawa Barat pertahun sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana butir 2 diktum ke 3 diatas kepada Kepala BKPPMD Jawa Barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Pendukungan Penanaman Modal di Jawa Barat pertahun
16) Penyusunan Buku Musyawarah Koordinasi Teknis se Jawa Bali pertahun
17) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Mukornis dan KP3MR pertahun
18) Panitia/Tim Panitia Kegiatan Koordinasi Pelaksana Agenda Promosi Jawa Barat
19) Penyusunan Draf Awal Agenda Promosi Jawa Barat pertahun
20) Penyusunan Draf Akhir Agenda Promosi Jawa Barat pertahun

# BAB IV
# ANALISIS KERJA PRAKTEK

## 4.1 Analisis system yang berjalan

1) Belum optimalnya system informasi manajemen penanaman modal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Sarana dan prasarana kantor/badan belum memenuhi standar yang dibutuhkan.berbagai sarana dan prasarana kantor masih sangat terbats seperti sarana mobilitor, m asih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kualitas agar memenuhi Standar kantor promosi yang modern dan refresentatif.
3) *Aparatur kurang menguasai manajemen promosi dan bahasa asing.* Sebagai badan lembaga teknis yang menangani promosi, aparaturnya masih memiliki kelemahan yang cukup mendasar menyangkut manajemen promosi dan penguasaan bahasa inggris.
4) *Belum tersedianya jabatan fungsional, yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan aparatur yang professional seperti penerjemah, ahli promosi , perencana dan pengawas investasi.

### 4.1.2 Analisis dokumen

1) Dokumen investor dan lampiran/persyaratan investasi dipenuhi,
2) Dokumen aplikasi investor kemudian akan di evaluasi dalam berbagai aspek, diantaranya dalam menyelesaikan dengan kebijakan teknis dan keuangan. Ada kalanya klarifikasi lebih anjut memerlukan data dan informasi tambahan yang harus dilampirkan.
3) Setelah proses evaluasi selesai, badan BKPPMD akan menerbitkan persetujuan investasi. Sluruh proses evaluasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja.
4) Setelah izin investasi dikeluarkan, perusahaan PMA/PMDN secara legal dapat didirikan dan beroprasi, sebagaimana tercantum dalam akta pembentukan perusahaan dari notaries daerah.
5) BKPPMD akan menerbitkan surat-surat izin yang dibutuhkan investor, yakni: Rencana kerja Asing (RPTKA) dan surat surat persetujuan Bea Cukai, APT (akta pengenal importer terbatas), IUT (izin usaha tetap), IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing). Sebagai tambahan perizinan di atas, pemerintah kabupaten/kota akan menerbitkan izin yang bersifat regional seperti: izin lokasi, izin konstuksi bangunan, izin gangguan (Nuisance Act Permit) dan surat hak tanah.

**A. Analisis Lingkungan Internal**

1) *Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas* Tersedianya berbagai ketentuan Permendagri mulai dari UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN serta berbagai investasi yang lebih Pro-Bisnis dan memperlancar kegiatan penanaman modal.
2) *Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang tugas penanaman modal.* Sumber daya aparatur yang ada memiliki pengalaman pengelolaan pelayanan penanaman modal serta berbagai pelatihan manajemen penanaman modal yang sangat menunjang dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
3) *Tersedianya standarisasi operasional pelaksanaan penanaman modal.Dalam memberikan pelayanan penanaman modal mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendaliannya telah diatur mulai dari Keppres yang mengatur tatacara permohonan penanaman modal sampai keputusan Kepala BKPM tentang pemantauan , evaluasi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.*
4) *Adanya komitmen dari unsure pimpinan untuk menunjang pelaksanaan tugas,* seluruh unsur pimpinan memiliki komitmen dan memahami arti

penting dan strategisnya penanaman modal sebagai motor penggerak (engine of growth) pertumbuhan ekonomi.

a. Kelemahan

1) Sarana dan prasarana kantor/badan belum memenuhi standar yang dibutuhkan.berbagai sarana dan prasarana kantor masih sangat terbats seperti sarana mobilitor, m asih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kualitas agar memenuhi Standar kantor promosi yang modern dan refresentatif.

2) Belum optimalnya system informasi manajemen penanaman modal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Aparatur kurang menguasai manajemen promosi dan bahasa asing. Sebagai badan lembaga teknis yang menangani promosi, aparaturnya masih memiliki kelemahan yang cukup mendasar menyangkut manajemen promosi dan penguasaan bahasa inggris.

4) Belum tersedianya jabatan fungsional, yang mendukung kelancaran pelaksanaan *tugas.*Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan aparatur yang professional seperti penerjemah, ahli promosi , perencana dan pengawas investasi.

**B.Analisis Lingkngan Eksternal**

a. Peluang

1) Minat Investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat masih tinggi. Sejak 1968 smpai saat ini , Jawa Barat senantiasa menempati urutan pertama dalam persetujuan investasi baik PMDN maupun PMA. Hal ini menunjukan Jawa Barat merupakan daerah yang sangat menarik dan prospektif dalam pelaksanaan investasi.
2) Besar clan beragarmnya sumber daya regional berpotensi untuk menarik investasi dan buyers. Jabar merupakan konsentrasi aktifitas industri yang hasil-hasilnya yang kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia serta luar negeri/ekspor. Jawa Barat sebagai pusat perkembangan Ilmu dan teknologi tidak lain didasarkan kepada kenyataan sebagai basis kegiatan. Jawa Barat memiliki lembaga pendidikan unggulan nasional seperti UNIKOM, ITB, IPB, UNPAD, dan sebagainya
3) Banyak dan beragamnya event promosi di dalam maupun luar negeri
4) Adanya kebutuhan kerjasama kegiatan promosi dan penanaman modal secara lokal , regional, nasional, dan Internasional.

b. Ancaman

*1)* Diskriminasi dalam pemberian persetujuan investasi bagi investor asing dan dalam negeri.Sampai saat ini masih ditemukan adanya perlakuan dari kebijakan diskriminatif antara Investor Asing dan Dalam Negeri. Hal ini menciptakan atmosfer investasi yang tidak kompetitif disbanding Negara lain.

*2)* Tuntutan dunia usaha menyangkut jaminan keamanan dan kepastian hokum sampai saat ini belum terpenuhi. Berbagai gangguan keamanan telah mencuptakan instabilator di bidang social, politik dan keamanan yang tidak kondusif bagi kegiatan investasi.

*3)* Pesatnya profesionalisme manajemen promosi dan penanaman modal dari berbagai institusi pesaing baik nasional maupun International. Terjadinya persaingan yang sangat ketat dari berbagai institusi promosi dan penanaman modal baik nasional maupun international dalam rangka menarik Investasi.

*4)* Penerapan insentif telah banyak dilaksanakan oelh institusi pesaing baik nasional maupun International. Semakin terbatasnya jumlah modal asing dari negara-negara maju (Pemilik Modal) telah menimbulkan persaingan dengan cara memberikan kemudahan dan insentif kepada para Investor Asin

### 4.1.2 Analisis prosedur yang sedang berjalan

hasil analisis document pada divisi/bidang fasilitasi&pelayanan investasi di (BKPPMD) badan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah jawa barat.

Calon investor yang ingin melakukan penanaman modal/investasi di jawa barat harus memperhatikan daftar Negatif investasi (Negative list for investment) daftar yang berisi sector bisnis yang tertutup baik bagi investasi domestic maupun asing, dan sector yang hanya tertutup bagi investor asing. Dalam hal tertentu, sector bisnis dapat diregulasi/ di buka bagi investor asing jika beberapa persyaratan tertentu dipenuhi, seperti: kerjasama dengan perusahaan Negara atau local, kerjasama dengan pelaku bisnis kecil dan usaha terletak pada lokasi tertentu. Syarat/kondisi husus bagi sector binis tertentu harus dipenuhi oleh investor, sejak dalam fase aplikasi hingga pelaksanaan aktivasi investasi modalnya di Indonesia.

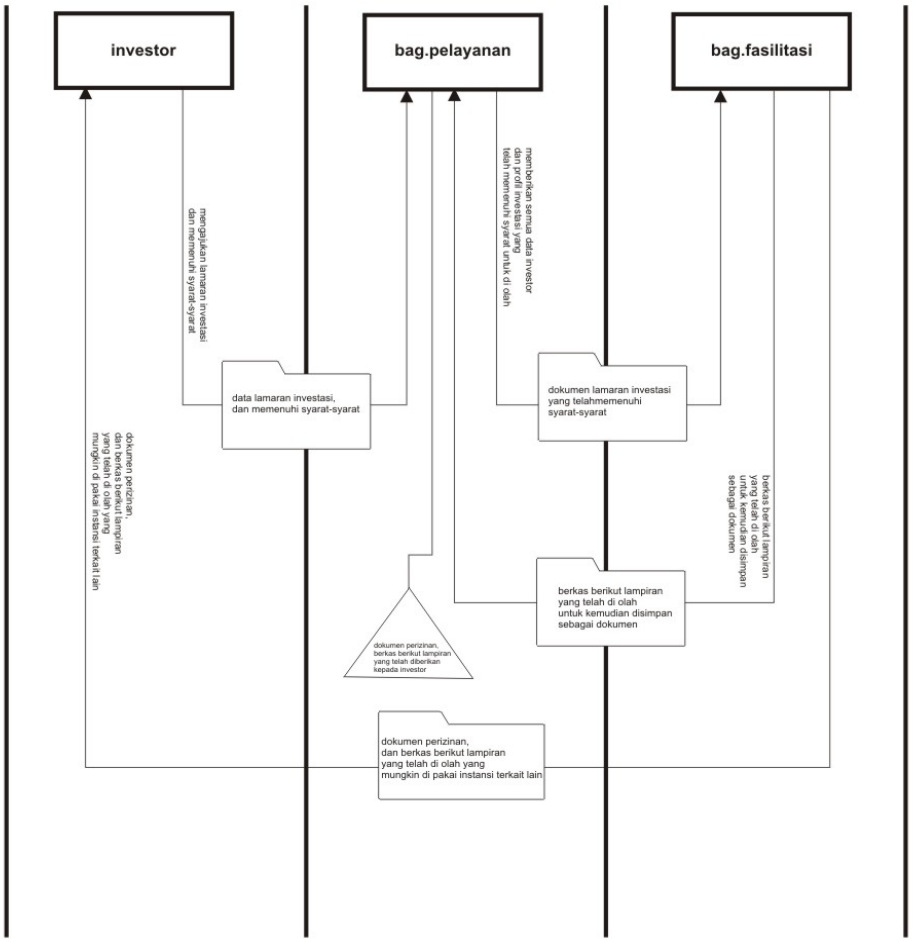
Dokumen aplikasi investor mula-mula disampaikan ke BKPM yang kemudian akan di evaluasi dalam berbagai aspek, diantaranya dalam menyelesaikan dengan kebijakan teknis dan keuangan. Ada kalanya klarifikasi lebih anjut memerlukan data dan informasi tambahan yang harus dilampirkan.

Setelah proses evaluasi selesai, badan BKPPMD akan menerbitkan persetujuan investasi. Sluruh proses evaluasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Setelah izin investasi dikeluarkan, perusahaan PMA/PMDN secara legal dapat didirikan dan beroprasi, sebagaimana tercantum dalam akta pembentukan perusahaan dari notaries daerah.

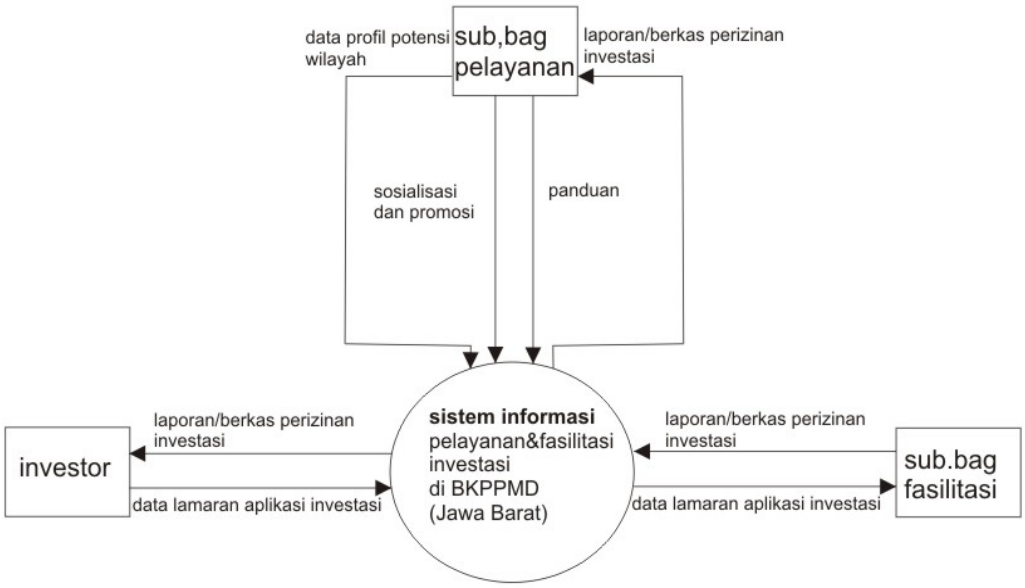
Untuk menjalankan proyek investasi yang telah disetujui, BKPPMD akan menerbitkan surat-surat izin yang dibutuhkan investor, yakni: Rencana kerja Asing (RPTKA) dan surat surat persetujuan Bea Cukai, APT (akta pengenal importer terbatas), IUT (izin usaha tetap), IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing).

Sebagai tambahan perizinan di atas, pemerintah kabupaten/kota akan menerbitkan izin yang bersifat regional seperti: izin lokasi, izin konstuksi bangunan, izin gangguan (Nuisance Act Permit) dan surat hak tanah.

### 4.1.2.1 Flow map



#### 4.1.2.2 Diagram context




### 4.1.3 Evaluasi prosedur yang sedang berjalan

Hasil dari evaluasi system yang sedang berjalan di BKPPMD Jawa barat, sebenarnya sisitem yang berjalan sudah cukup baik, hanya saja semua kegiatan yang di lakukan di bagian/divisi pelayanan&fasilitasi investasi di BKPPMD jawa barat masih dilakukan secara manual sehingga masih dapat dikatakan kurang optimal dalam kualitas dan kuantitas pelayanan, fasilitasi, maupun promosi yang dilakukan untuk dapat melayani, memfasilitasi maupun

mensosialisasikan untuk menarik minat investor local maupun asing berinvestasi di jawa barat. Dari permasalahan ini penulis ingin mengembangkan system informasi bagian/divisi pelayanan dan fasilitasi investasi yang ada di BKPPMD jawa Barat untuk meningkatkan investor local maupun asing berinvestasi di jawa barat.

## 4.2 Usulan perancangan sistem

Usulan perancangan system dari penulis adalah membuat system informasi yang berada di bagian/divisi pelayanan&fasilitasi investasi di BKPPMD jawa barat yang masih manual menjadi system informasi berbasis web

### 4.2.1 tujuan perancangan sistem

1. memudahkan kegiatan sosialisai yang lebih efektif dan efisien
    a. Berkembangnya jaringan sisten informasi dan akses pasar dalam negeri dan luar negeri.
    b. Meningkatnya pelaksanaan promosi dagang dan kerjasama ekonomi antar daerah maupun luar negeri.
    c. Mendorong pelaku usaha ntuk menanamkan modalnya di Jawa Barat

2. memudahkan kegiatan pelayanan dan fasilitasi investasi

a. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi investasi yang memenuhi tuntutan dunia usaha
b. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi investasi yang memenuhi tuntutan investor

Dengan di realisasikannya usulan perancangan system dari penulis agar membuat system informasi yang berada di bagian/divisi pelayanan&fasilitasi investasi di BKPPMD jawa barat yang masih manual menjadi system informasi berbasis web diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di jawa barat. Sebab dengan canggihnya teknologi pelayanan dan pemfasilitasan berinvestasi pasti yang mendukung kemudahan akan meningkatkan investor yang datang untuk berinvestasi, dan dengan meningkatnya investor yang berinvestasi di jawa barat maka itu berarti meningkatnya juga pendapatan kab/kota jawa barat itu sendiri.

Meningkatnya investor yang berinvestasi di jawa barat akan berpengaruh/ berimbas juga pada kesejahteraan masyarakat jawa barat itu sendiri sebab kegiatan ini akan membuka peluang/lapangan kerja yang lebih besar lagi bagi masyarakat jawa barat.

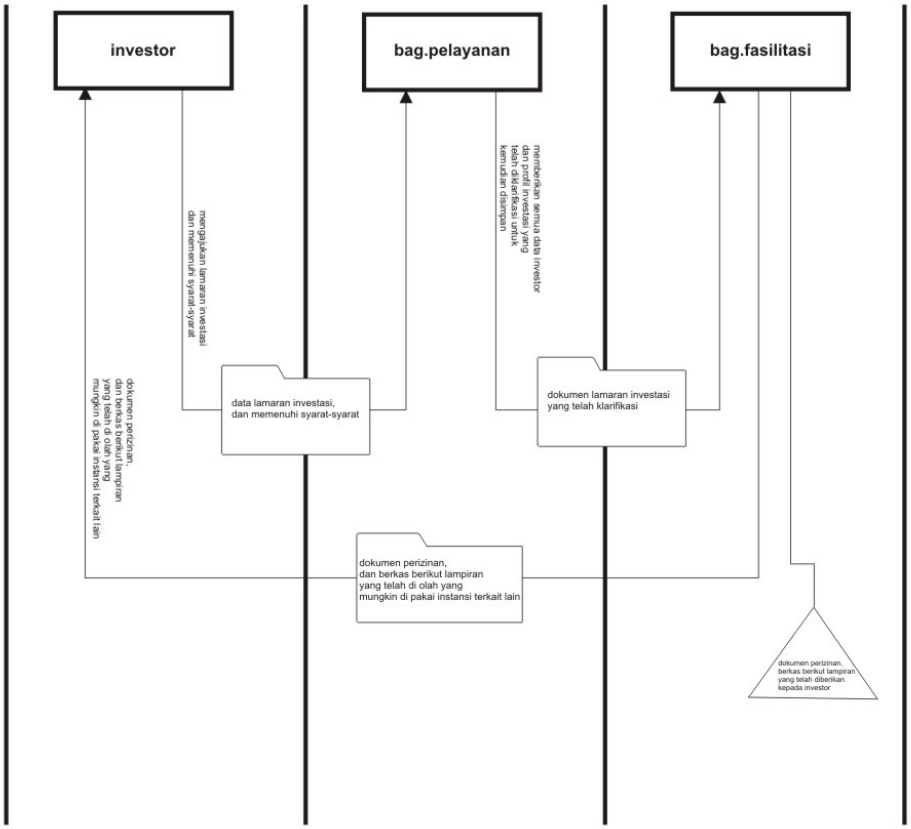
### 4.2.2 perancangan prosedur yang di usulkan

Perancangan prosedur yang di usulkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur yang sedang berjalan sekarang,yaitu :

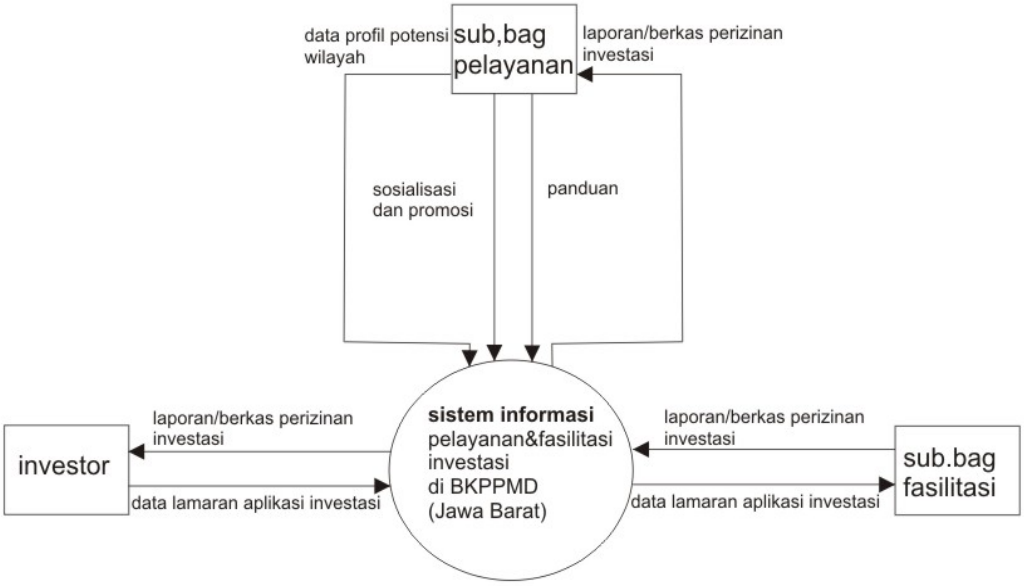
1) Calon investor yang ingin melakukan penanaman modal/investasi di jawa barat harus memperhatikan daftar Negatif investasi (Negative list for investment) daftar yang berisi sector bisnis yang tertutup baik bagi investasi domestic maupun asing, dan sector yang hanya tertutup bagi investor asing. Dalam hal tertentu, sector bisnis dapat diregulasi/ di buka bagi investor asing jika beberapa persyaratan tertentu dipenuhi, seperti: kerjasama dengan perusahaan Negara atau local, kerjasama dengan pelaku bisnis kecil dan usaha terletak pada lokasi tertentu. Syarat/kondisi husus bagi sector binis tertentu harus dipenuhi oleh investor, sejak dalam fase aplikasi hingga pelaksanaan aktivasi investasi modalnya di Indonesia.
2) kemudian akan di evaluasi dalam berbagai aspek, diantaranya dalam menyelesaikan dengan kebijakan teknis dan keuangan. Ada kalanya klarifikasi lebih anjut memerlukan data dan informasi tambahan yang harus dilampirkan.
3) Setelah proses evaluasi selesai, badan BKPPMD akan menerbitkan persetujuan/perizinan investasi BKPPMD akan menerbitkan surat-

surat izin yang dibutuhkan investor, yakni: Rencana kerja Asing (RPTKA) dan surat surat persetujuan Bea Cukai, APT (akta pengenal importer terbatas), IUT (izin usaha tetap), IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing). Sebagai tambahan perizinan di atas, pemerintah kabupaten/kota akan menerbitkan izin yang bersifat regional seperti: izin lokasi, izin konstuksi bangunan, izin gangguan (Nuisance Act Permit) dan surat hak tanah.

#### 4.2.2.1 Flow map



#### 4.2.2.2 Diagram context




### 4.2.3 evaluasi system yang di usulkan

Hasil dari evaluasi system yang di usulkan untuk BKPPMD Jawa barat, jelas akan mempermudah bagian/divisi pelayanan&fasilitasi di BKPPMD Jawa Barat dalam hal melayani dan memfasilitasi, maupun mensosialisasikan kepada investor local maupun asing untuk berinvestasi hususnya dijawa barat.

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Kesmpulan dari penulis sesuai dengan hasil dari kerja praktek yang dilakukan di bidang/divisi pelayanan&fasilitasi investasi yang ada di BKPPMD Jawa Barat menyimpulkan yaitu

1) system informasi yang di usulkan oleh penulis akan lebih meningkatkan kinerja pelayanan dan fasilitasi investasi
2) dengan menggunakan system yang berbasis web akan membuat kegiatan usaha tersebut menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.
3) System yang di usulkan lebih dalam pengolahan data dan informasi penanaman modal pada Subbidang pelayanan dan fasilitasi investasi.
4) system informasi yang di usulkan mempermudah akses pasar dalam negeri dan luar negeri, maka akan Meningkatkan pelaksanaan promosi dagang dan kerjasama ekonomi antar daerah maupun luar negeri, dan Mendorong pelaku usaha ntuk menanamkan modalnya di Jawa Barat

## 5.2 Saran

Saran dari penulis sesuai dengan hasil dari kerja praktek yang dilakukan di bidang/divisi pelayanan&fasilitasi investasi yang ada di BKPPMD Jawa Barat seendaknya

1) usulan yang diajukan oleh penulis segera di realisasikan untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan dan fasilitasi investasi menjadi lebih efektif dan efisien, karna dengan optimalnya kegiatan kegiatan fasilitasi dan investasi maupun promosi akan dapat meningkatkan investor yang akan berinvestasi hususnya di jawa barat.
2) BKPPMD harus mengembangkan/meningkatkan system informasi yang ada sekarang untuk lebih memudahkan akses pasar dalam negeri dan luar negeri
3) bidang/divisi pelayanan&fasilitasi investasi yang ada di BKPPMD Jawa Barat hendaknya mengikuti perkembangan jaman yang dewasa ini berkembang sangat pesat.